BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²¹ Adapun yang dimaksud perikatan dalam buku III B.W yaitu suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²²

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6-7

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984, cet.XVIII), hlm. 122

Istilah perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal dengan *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²³ Konsep *al-'aqdu* atau *al-'ahdu* dalam kegiatan muamalah lebih dikenal dan dianggap baku. Kedua konsep tersebut diatur dalam Al-Qur'an. Konsep *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِدَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Tafsir dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan haruslah ditunaikan oleh orang yang berakad/berjanji. Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, cet.1), hlm. 75

dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum.²⁴

Demikian pula sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ

Artinya : *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

Tafsir dari surat Ali Imran ayat 76, yaitu *Bukan* seperti yang kamu katakan, wahai Bani Israil, bahwa tidak ada dosa bagi kamu menipu orang lain yang tidak seagama dengan kamu. *Sebenarnya siapa pun yang menepati janjinya*, antara lain dengan menunaikan amanah secara sempurna *dan bertakwa*, yakni mengindahkan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, *maka sesungguhnya Allah menyukai* karna Allah *menyukai orang-orang yang bertakwa*, yakni menyukai amal-amal mereka sehingga, bila

²⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan teori hukum dan teknis pembuatan kontrak, kerjasama dan bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.47-48

mereka mengamalkannya, Allah pun menyukai mereka.²⁵

Berdasarkan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan QS. Ali-Imran ayat 76, esensi *al-'aqdu* adalah keharusan menepati janji untuk bertakwa dan adanya causa yang halal secara syariah. Dalam *al-'aqdu*, janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia dibuat menurut syariah mempunyai pertanggung jawaban yang vertikal dan horizontal, dalam arti bahwa janji yang telah dibuat haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dibatalkan karena akan merugikan salah satu pihak dan di dalam pembatalan tersebut terkandung pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

Dalam literatur, secara harfiah, *al-'aqdu* berarti ikatan atau simpul tali, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*), juga berarti perjanjian, perikatan dan permufakatan (*al-ittifaq*). Ensiklopedia Islam memberikan definisi mengenai akad atau *'aqdu* sebagai “pertalian ijab (penyerahan) dengan qabul (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syariat yang berpengaruh kepada objek yang dijanjikan”. Makna *'aqdu* dalam konteks hukum

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.154

adalah kesepakatan yang mengikat antara dua orang pihak, yang mana kesepakatan ini dibuat dengan cara-cara yang hukum (syariah) dibenarkan dan mempunyai akibat hukum.²⁶

Istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pihak lain.²⁷ Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan. Itulah yang diisyaratkan dalam QS. Al-Imran ayat 76. Oleh karena itu, *al 'ahdu* dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah adanya unsur tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah dibuat secara baku (*standard form*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada

²⁶ Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 54

²⁷ Faturrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syariah*", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et al*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, cet.1), hlm. 248

pihak lain untuk melakukan negoisasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian.

Pengertian klausul baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁸ Perjanjian baku dalam hukum kontrak sering dikenal dengan perjanjian standar. Karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).²⁹

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (*conditional*) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.3

²⁹ Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 140

kebutuhan. Formulir-formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain. Karakter tersebut menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, para konsumen tidak memiliki posisi tawar-menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh.³⁰

3. Kredit dan Perjanjian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Credere*” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “*kredit*”, mempunyai arti kepercayaan.³¹ Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau penerima pinjaman atau penghutang) dengan janji membayar

³⁰ Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, hlm.141

³¹ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm.1

dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.³²

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.³³

4. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³⁴ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas

³² Bendi Linggau, Dr. Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Sinar Sinanti, Anggota Ikapi Jakarta Cetakan Pertama, 2010), hlm.19

³³ Gazali S Dzoni, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet.2), hlm.5

kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), menjelaskan sebagai berikut:³⁵

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008)*, hlm.5

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan UKM atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- d. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.³⁶

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008)*, hlm.31

B. Rukun dan Syarat Perjanjian

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian”, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.³⁷ Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan suatu perjanjian.

1. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat, sebagai berikut:³⁸

- a. Sepakat (bagi yang mengikatkan diri)
- b. Kecakapan (untuk membuat perikatan)
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966

³⁸ Dhanang Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV Keni Media, 2018), hlm.82

Syarat yang pertama (1 dan 2) disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian atau para pihak dalam perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang kedua (3 dan 4) disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian sebagai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak (subjek hukum). Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.³⁹

Untuk lebih jelasnya keempat syarat yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Sepakat (bagi yang mengikatkan diri)

Sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui para pihak untuk mengadakan perjanjian. Kehendak tersebut harus sesuai satu sama lain. Para pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak, artinya, tidak ada tekanan dalam menyatakan kehendak tersebut.

b. Kecakapan (untuk membuat perikatan)

Kecakapan mengandung pengertian bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian harus

³⁹ Dhanang Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, hlm.83

cakap menurut hukum, yaitu kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang dipikul atas setiap perbuatan yang dilakukan. Subekti berpendapat bahwa pada dasarnya, setiap orang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.⁴⁰

c. Suatu hal tertentu

Pengertian suatu hal tertentu, yaitu dalam suatu perjanjian, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu atau suatu barang tertentu yang secara jelas dan terang. Perjanjian yang objeknya tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah batal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, sepanjang tidak dilarang tegas oleh undang-undang, dapat menjadi objek suatu perjanjian.

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.73

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian suatu sebab yang halal, yaitu isi atau maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian merupakan sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan.

Selanjutnya apabila syarat-syarat atau salah satu syarat dari empat syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka suatu perjanjian akan dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif untuk sah nya perjanjian.

Dalam hal syarat subjektif tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya. Dan sepanjang belum ada pembatalan oleh hakim, perjanjian ini tetap berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian walaupun suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif ini tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi tidak mempunyai kepastian karena setiap saat terancam oleh bahaya pembatalan dan tergantung pada

kesediaan suatu pihak untuk mematuhinya. Sedangkan dalam suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian ini batal demi hukum, artinya tidak pernah terjadi suatu perjanjian dan berarti pula tidak pernah ada perikatan.⁴¹

Dalam KUH Perdata terdapat asas-asas yang melandasi atau menjadi tumpuan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut Mohammad Daud Ali, apabila asas dihubungkan dengan kata *hukum* adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁴²

Asas-asas dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak, menurut Mariam Darus Badruzaman, meliputi:⁴³

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini merupakan asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini pula dinamakan sebagai asas otonomi “konsensualisme”, yang

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 20

⁴² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005, hlm.25

⁴³ Dhanang Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV Keni Media, 2018), hlm.78

menentukan “adanya” perjanjian. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan. Perjanjian yang diadakan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata memiliki kekuatan mengikat. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Asas konsensualitas dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi dan saling mengikatkan diri. Asas konsensualisme dalam Pasal 1338 KUH Perdata, terdapat dalam istilah “semua” yang mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal dalam undang-undang.

c. Asas Kepercayaan

Perjanjian yang diadakan antara satu pihak dan pihak lain, menumbuhkan adanya saling

percaya masing-masing pihak untuk memegang sekaligus melaksanakan atau mewujudkan perjanjian tersebut. Para pihak akan memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Tanpa adanya kepercayaan, perjanjian tidak mungkin diadakan. Para pihak percaya untuk saling mengikatkan diri, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Keterikatan para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan. Unsur-unsur lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral pula bersifat mengikat perjanjian tersebut.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, meskipun terdapat perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mendorong kepastian hukum. Kepastian hukum terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Kepatutan

Asas kepatutan terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian. Asas kepatutan harus dipertahankan, karena melalui asas kepatutan,

ukuran tentang hubungan ditentukan pula oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

i. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 *juncto* Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan:⁴⁴

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan dinyatakan.”

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang telah diatur secara tegas, tetapi pula hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

Asas-asas hukum perjanjian yang merupakan sub-sistem hukum, saling berkait dengan sub-sub sistem dan sistem-sistem yang lain, sehingga harus terjalin hubungan yang harmonis, serasi, seimbang, tidak tumpang tindih, dan tidak berbenturan satu sama lain, karena adanya saling keterpaduan.⁴⁵

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.83

⁴⁵ Dhanang Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV Keni Media, 2018), hlm.82

2. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk ke dalam rukun akad, yaitu:⁴⁶

a. Para pihak yang berakad (*al-aqidain*)

Al-aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perjanjian), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua jenis yaitu manusia dan badan hukum. Adapun syarat dari *al-aqidain* ini sendiri, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Dewasa (*baligh*). Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.
- 3) *Aqil* (berakal). Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat.

⁴⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 48

Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

- 4) *Tamyiz* (dapat membedakan). Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
- 5) *Mukhtar* (bebas dari paksaan). Para pihak harus bebas dalam bertansaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

b. Objek akad (*Mahallul 'Aqd*)

Mahallul 'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd*, sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti

menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh.

- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.⁴⁷
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ke salah pahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
- 4) Objek dapat di serahterimakan. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam

⁴⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 56

kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.

c. Tujuan akad (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah dan apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

d. Ijab dan Kabul (*Shigat al-'aqd*)

Shigat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabu.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat asas-asas yang melandasi suatu perjanjian sebagai tumpuan dan landasan berpikir atau sebagai prinsip dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut Fathurrahman Djamil mengemukakan ada enam asas yang berkaitan dalam hukum perikatan Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalat, yaitu *asas ilahiah* atau *asas tauhid*.⁴⁸

a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

⁴⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm.25

Tafsir dari surat Al-Hadid ayat 4 diatas menjelaskan bahwa Allah selalu memerhatikan kamu, menyaksikan apa yang kamu amalkan, dimana saja kamu berada, entah di laut, entah di darat, entah pun siang entah pun malam, entah di luar, entah sedang di rumah, entah sedang berjalan seorang diri. Apa yang kita katakan didengar-Nya, walaupun masih bisikan hati kita, belum keluar dari ucapan. Ayat inilah yang menyuruh sekalian orang yang beriman itu hati-hati, baik ketika dia di hadapan orang banyak maupun ketika dia diam sendirinya.⁴⁹

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan dan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai tauhid. Dengan demikian, manusia dalam berakad mesti selalu berada pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Tauhid mesti menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 8 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.658

akhir meraih ridha Allah. Oleh karena itu, manusia yang berasas ilahiah dalam berbagai aktivitasnya tidak akan bertindak sembarangan atau melampaui batas karena mesti menyelaraskan diri dengan ketetapan Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan. Kaidah di bidang muamalah adalah “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Oleh karena itu, berbagai aktivitas manusia *sepanjang dalam hal yang mubah dan tidak terlarang*, maka para pihak memiliki kebebasan dalam bertransaksi dan menentukan berbagai segi dari transaksi tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.40

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan atas asas persamaan dan kesetaraan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara. Tidak diperkenankan adanya eksploitasi (kezaliman) salah satu pihak atas pihak lainnya.

d. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, maupun antara masyarakat satu dan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.⁵¹ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah

⁵¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 28

dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad, seperti transaksi ribawi, mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya, serta menunda-nunda pembayaran utang bagi pihak yang mampu.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' (14): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بِئْتِنَافِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*

Dari hadits Nabi SAW. Yang mengemukakan prinsip *an-taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.⁵²

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Al-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara pihak. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.97

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya untuk membuat perikatan adalah dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁵³ Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka

⁵³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm.31

akad ini harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian).⁵⁴

C. Pengertian Koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*)

Koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* (Bahasa Inggris) yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan, sedangkan menurut istilah koperasi adalah salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat, memajukan tingkat ekonomi kehidupan bersama.⁵⁵ Menurut Masjfuk Zuhdi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁵⁶

Sebagian ulama menyebutkan bahwa koperasi sama dengan *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong)

⁵⁴ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya : Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.62

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.129-130

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.291

yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karna satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁵⁷

Syirkah secara etimologi mempunyai arti percampuran (*al-ikhtitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵⁸

D. Dasar Hukum Koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*)

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah*

⁵⁷http://Saktirangkuti.blogspot/2013/12/Koperasi_Dalam_Pandangan_Islam.html. Diakses pada tanggal 7 Febuari 2020, pukul:11.30 WIB.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013, cet. Ke-2), hlm.220

oleh para ulama adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda :

*“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”*⁵⁹

Dalam Al-Qur’an surat Shaad : 24 dijelaskan bahwa :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ق وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : *Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”*. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.127

Melihat keterangan diatas, lafal *Al-Khulata'* diartikan *Syuraka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁶⁰ *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas.⁶¹

E. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan qabul). *Ijab* sebagai ungkapan penawaran melakukan perserikatan dan *qabul* sebagai ungkapan penerimaan perserikatan. *Shigat* sebagai bentuk perwujudan adanya transaksi *syirkah*.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.342

⁶¹ Wikkie Gusti Ramadhan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus CV.Wavindo Utama Palembang)*, Palembang: Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm.40

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu :

1. Dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*). Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*), yaitu: baligh, berakal, pandai, dan cakap.
2. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini biasanya berupa merupakan harta maupun pekerjaan. Modal pokok tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui.
3. Tujuan *syirkah*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
4. *Shigat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi dengan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shigat* terdiri dari ijab dan qabul yang sah, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:⁶²

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai

⁶² <http://repository.uin-suska.ac.id/6402/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Febuari 2020, pukul: 20.50 WIB.

(*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.